

Pengaruh Tata Kelola Perusahaan Terhadap Tanggung jawab Sosial Perusahaan Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia

Mir'atun Mir'atun^{1*}, Muhammad Syafaat², Nurfitriani Nurfitriani³

¹ Jurusan Perbankan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, IAIN Palu

² Jurusan Perbankan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, IAIN Palu

³ Jurusan Perbankan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, IAIN Palu

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh tata kelola perusahaan dengan pengungkapan tanggungjawab sosial perusahaan. Metode penilaian tata kelola perusahaan menggunakan ukuran dewan komisaris independen, dewan direksi dan dewan pengawas syariah, sedangkan untuk pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan dalam penelitian ini menggunakan model *Islamic Social Reporting Index* (ISR Index) yang mengungkapkan 50 (lima puluh) item pengungkapan tanggungjawab sosial. Metodologi dalam penelitian ini termasuk dalam jenis verifikasi dengan pendekatan kuantitatif. Teknik pengambilan sampel dilakukan secara *purposive sampling* dengan tujuan untuk mendapatkan sampel yang representatif sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan. Kriteria sampel adalah seluruh bank umum syaria'ah yang tercatat sampai tahun 2016 dan masuk dalam kategori Bank Umum Swasta Nasional (BUSN) Devisa, menerbitkan laporan tahunan dari periode 2012-2015, dan melaksanakan CSR. Hasil penelitian ini secara parsial menunjukkan bahwa ukuran dewan komisaris independen dan dewan direksi bank umum syariah memiliki pengaruh terhadap pengungkapan tanggungjawab sosialnya, sedangkan ukuran dewan pengawas syariah bank umum syariah tidak memiliki pengaruh terhadap pengungkapan tanggungjawab sosialnya. Hasil penelitian secara simultan dewan komisaris independen, dewan direksi dan dewan pengawas syariah memiliki pengaruh terhadap pengungkapan tanggungjawab sosial pada bank umum syariah. Keterbatasan dalam penelitian ini yakni jumlah sampel yang relatif sedikit, serta sampel penelitian ini hanya terbatas pada bank umum syariah yang masuk dalam kriteria Bank Umum Swasta Nasional (BUSN) Devisa dan variabel yang digunakan untuk mengukur *good corporate governance* hanya terdapat 3 (tiga) variabel yakni dewan komisaris independen, dewan direksi dan dewan pengawas syariah.

INFORMASI ARTIKEL

Kata kunci:

Tata kelola perusahaan,
Tanggung jawab sosial,
Bank umum syariah,

1. PENDAHULUAN

Konsep *corporate governance*¹ muncul berdasarkan *agency theory* yang memandang bahwa dalam suatu perusahaan terdapat dua pihak yang saling berinteraksi yaitu pihak manajemen sebagai agen dan pihak pemilik sebagai prinsipal, dimana pihak manajemen (agen) lebih mengetahui keadaan sebenarnya mengenai perusahaan dibanding pihak pemilik (prinsipal).² Dari pandangan kelembagaan, *corporate governance* terkait langsung dengan pembuat kebijakan publik karena hukum, regulasi dan institusi-institusi yang ada merupakan sumber yang paling penting bagi pembentukan kerangka normatif tata kelola perusahaan (*corporate governance framework*) di suatu negara.³

Tujuan perusahaan dalam penerapan *good corporate governance* adalah untuk membangun citra perusahaan dan memenuhi tanggung jawab kepada pemegang saham, masyarakat dan kesejahteraan karyawan.⁴ Oleh karena itu, GCG ini sangat diperlukan dalam pengembangan suatu perusahaan agar

perusahaan lebih meningkatkan keberhasilan baik dalam perusahaan itu sendiri maupun di masyarakat.

Keputusan Menteri BUMN No. Kep. 117/M-MBU/2002 menekankan kewajiban BUMN untuk menerapkan GCG dengan konsisten dan menjadikan prinsip GCG sebagai landasan operasional.⁵ Perusahaan dengan pengelolaan yang baik dan transparan, berarti sudah menerapkan GCG. Untuk mencapai hal tersebut, maka perusahaan dituntut secara hukum untuk menerapkan prinsip GCG seperti tersirat dalam Pedoman Umum *good corporate governance* Indonesia yang dikeluarkan oleh Bapepam diantaranya: transparansi,

¹Tata Kelola Perusahaan juga dalam penulisan dialih bahasakan dengan *Good Corporate Governance/GCG*.

²Nur Hisamuddin dan M. Yayang Tirta K, "Pengaruh *Good Corporate Governance* Terhadap Kinerja Keuangan Bank Umum Syariah," (on-line) (http://respository.unej.ac.id/bitstream/handle/123456789/58628/Nur%20Hisamuddin_1.pdf?sequence=1), (diakses 30 Mei 2016).

³Indra Surya dan Ivan Yustiavandana, *Penerapan Good Corporate Governance* (Jakarta: Kencana, 2008), 9.

⁴Kartina Natalylova, "Pengaruh *Corporate Governance* Terhadap *Corporate Social Responsibility* dan Kinerja Perusahaan Yang Mendapatkan Indonesia *Sustainability Reporting Awards*," *Media Bisnis* (November 2013), 163.

⁵Helfina Rimardhani, R. Rustam Hidayat, dan Dwiatmanto, "Pengaruh Mekanisme *Good Corporate Governance* Terhadap Profitabilitas Perusahaan: Studi Pada Perusahaan BUMN Yang Terdaftar Di BEI Tahun 2012-2014," *Jurnal Administrasi Bisnis (JAB)* 31, no. 1 (Februari 2016), 169.

kuntabilitas⁶, responsibilitas, independensi, kewajaran dan kesetaraan.⁷

Salah satu penyebab skandal keuangan pada perusahaan publik yang melibatkan manipulasi laporan keuangan adalah kurangnya penerapan *corporate governance*.⁸ Sehingga pengaturan dan pengimplementasian GCG memerlukan komitmen dari seluruh jajaran organisasi dan dimulai dengan penetapan kebijakan dasar serta tata tertib yang harus dianut oleh top manajemen dan penerapan kode etik yang harus dipatuhi oleh semua pihak yang ada didalamnya. Selanjutnya gagasan utama GCG yang baik adalah mewujudkan tanggung jawab sosial.⁹

Good corporate governance (GCG) dan *corporate social responsibility* (CSR)¹⁰

merupakan dua konsep yang tumbuh dan berkembang pada saat yang bersamaan diawal tahun 2000, yang menyangkut kegiatan dunia usaha dalam hubungannya dengan masyarakat dan menjadi perhatian luas dikalangan akademis, praktisi, LSM dan pelaku dunia usaha di dalam maupun di luar.¹¹ Krisis keuangan yang menimpa beberapa negara memberikan dampak pada masyarakat dan lingkungan sosial, disebabkan rendahnya kepedulian sosial dari perusahaan.¹² Penerapan *good corporate governance* serta pengungkapan informasi *corporate social responsibility* merupakan suatu konsep yang diharapkan mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi seiring dengan transparansi pengelolaan perusahaan

⁶Ada beberapa model akuntabilitas, yakni: akuntabilitas keatas (*accountability upwards*), akuntabilitas kepada staff (*accountability to staff*), akuntabilitas kebawah (*accountability downwards*), akuntabilitas yang berbasis pasar (market-based forms of *accountability*) dan akuntabilitas kepada diri sendiri (*self accountability*), Lihat, Wahyudi Kumorotomo dalam Ferlie *et. al.*, *Akuntabilitas Birokarsi Publik: Sketsa Pada Masa Transisi* (Cet. III, Pustaka Pelajar: Yogyakarta, 2013), 4.

⁷Amalia Ramdhaningsih dan I Made Karya Utama, "Pengaruh Indikator *Good Corporate Governance* dan Profitabilitas Pada Pengungkapan *Corporate Social Responsibility*," *E-Jurnal Akuntansi Universitas 3*, no. 3 (2013), 66.

⁸Marihot Nasution dan Doddy Setiawan, "Pengaruh *Corporate Governance* Terhadap Manajemen Laba Di Industri Perbankan Indonesia," *Simposium Nasional Akuntansi X* (Juli 2007), 2.

⁹Etty Murwaningsari, "Hubungan *corporate Governance*, *Corporate Social Responsibility* dan

Corporate Financial Performance Dalam Satu Continuum," *Jurnal Akuntansi dan Keuangan* 11, no. 1 (Mei 2009), 21.

¹⁰Tanggung Jawab Sosial juga dalam penulisan ini dialih bahasakan dengan *Corporate Social Responsibility/CSR*.

¹¹Dian Putri Pamungkas, "Pengaruh *Good Corporate Governance* (GCG) Terhadap Implementasi *Corporate Social Responsibility* (CSR) Pada Industri Pertambangan dan Penggalian (BUMN Persero Terbatas)," (on-line), (<http://ejournal.unesa.ac.id/article/1188/57/article.pdf>), (diakses 30 Mei 2016).

¹²Andi Okta Riansyah, "Rekontruksi Pelaporan *Corporate Social Responsibility* Perbankan Syariah Dalam Konsep *Social Maslahah*: Studi Bank Muamalat Indonesia, Bank Syari'ah Mandiri, dan Bank Rakyat Indonesia" (Skripsi tidak diterbitkan, Semarang: Program Strata Satu, Universitas Diponegoro, 2016), 1.

yang makin baik dan nantinya menguntungkan banyak pihak.¹³

Di Indonesia, istilah CSR semakin populer digunakan sejak tahun 1990 dan mulai marak sekitar tahun 2005, sedangkan di negara-negara lain sudah menggerakkan dan menerapkan CSR di tahun 1980.¹⁴ Kegiatan CSR pada awalnya bersifat filantropis kemudian diatur dengan keluarnya peraturan yang mewajibkan kegiatan CSR yakni UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas mewajibkan perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam untuk melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan.¹⁵ Kewajiban melaksanakan CSR juga diberlakukan bagi perusahaan yang melakukan penanaman modal di Indonesia sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman

Modal yang tertuang dalam Pasal 15, 17 dan 34.¹⁶ CSR menekankan bahwa perusahaan harus mengembangkan praktik bisnis yang etis dan berkesinambungan (*sustainable*) secara ekonomi, sosial dan lingkungan.¹⁷

CSR sebagai sebuah gagasan, perusahaan tidak lagi dihadapkan pada tanggung jawab yang berpijak pada *single bottom line*, yaitu nilai perusahaan (*corporate value*) yang direfleksikan dalam kondisi keuangannya (*financial*) saja. Tapi tanggung jawab perusahaan berpijak pada *triple bottom lines*, disini *bottom lines* lainnya selain finansial juga ada sosial dan lingkungan.¹⁸ Untuk menjamin keberlanjutan perusahaan maka perusahaan tidak hanya terfokus pada masalah finansial saja akan tetapi memperhatikan juga lingkungan sosial sekitarnya.

¹³Riha Dedi Priantana dan Ade Yustian, "Pengaruh Struktur *Good Corporate Governance* Terhadap Pengungkapan *Corporate Social Responsibility* Pada Perusahaan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia", *Jurnal Telaah dan Riset Akuntansi* 4, no. 1 (Januari 2011), 13.

¹⁴Izza Ashifa, "Pengaruh *Corporate Governance* Dan Karakteristik Perusahaan Terhadap Pengungkapan *Corporate Responsibility*" (Skripsi tidak diterbitkan, Semarang: Program Strata Satu, Universitas Diponegoro, 2016), 1.

¹⁵Muhammad Titan Terzaghi, "Pengaruh *Earning Management* dan Mekanisme *Corporate Governance* Terhadap Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar Di Busra Efek Indonesia," *Jurnal Ekonomi dan Informasi Akuntansi* (JENIUS) 2, no. 1 (Januari 2012), 31.

¹⁶Danu Candra Indrawan, "Pengaruh *Corporate Social Responsibility* Terhadap Kinerja Perusahaan" (Skripsi tidak diterbitkan, Semarang: Program Strata Satu, Universitas Diponegoro, 2016), 3.

¹⁷Ati Harmoni dan Ade Andriyani, "Pengungkapan *Corporate Social Responsibility* (CSR) Pada *Official Website* Perusahaan: Studi Pada PT. Unilever Indonesia Tbk," *KOMMIT* (Agustus 2008), 475.

¹⁸Rika Nurlela dan Islahuddin, "Pengaruh *Corporate Social Responsibility* Terhadap Nilai Perusahaan Dengan Prosentase Kepemilikan Manajemen Sebagai Variabel Moderating: Studi Empiris Pada Perusahaan Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia," *Simposium Nasional Akuntansi XI* (Juli 2008), 3.

Walaupun secara umum praktek GCG dan CSR lebih banyak dilakukan oleh perusahaan tambang maupun manufaktur, namun seiring dengan adanya tren global akan praktik GCG dan CSR, saat ini industri perbankan juga telah menyebutkan aspek tata kelola perusahaan yang baik dan pengungkapan pertanggungjawaban sosial dalam laporan tahunannya walaupun dalam bentuk yang relatif sederhana.

Aktivitas CSR di perbankan syariah pada dasarnya telah melekat secara *inhern* sebagai konsekuensi kebersandaran bank syariah pada ajaran Islam. Berbeda dengan bank konvensional tidak dapat dipisahkan secara dikotomis antara orientasi bisnis dengan orientasi sosialnya. Orientasi bisnis seharusnya juga membawa orientasi sosial, atau setidaknya tidak kontradiksi dengan orientasi sosial.¹⁹ Hal ini membawa konsekuensi pada kuatnya karakter sosial dari perbankan syariah dalam melaksanakan aktivitas-aktivitas sosialnya, relatif jika dibandingkan dengan bank konvensional.

Aktivitas-aktivitas sosial dari bank syariah merupakan nilai tambah yang dapat berimplikasi pada meningkatnya

profitabilitas jangka panjang dan *goodwill* yang diperoleh dari citra positif dari bisnis yang dijalankan serta meningkatnya kepercayaan *stakeholder* terhadap kinerja bank syariah.²⁰ Sehingga semakin baik tata kelola perusahaan maka dalam pengungkapan *corporate social responsibility* akan semakin baik pula dan transparan dalam laporan tahunannya.

Beberapa penelitian sebelumnya menunjukkan terdapat pengaruh antara tata kelola perusahaan terhadap pengungkapan tanggungjawab sosial perusahaan terutama pada industri perbankan syariah. Misalnya, penelitian yang dilakukan oleh Amirul Khoirudin²¹ dalam hasil penelitiannya menunjukkan bahwa ukuran dewan komisaris terbukti memiliki pengaruh positif signifikan terhadap pengungkapan *Islamic social reporting* pada perbankan syariah di Indonesia. Sedangkan ukuran dewan pengawas syariah tidak terbukti berpengaruh terhadap pengungkapan *Islamic social reporting* pada perbankan syariah di Indonesia.

¹⁹M.B. Hendrie Anto dan Dwi Retno Astuti, "Persepsi Stakeholder Terhadap Pelaksanaan Corporate Social Responsibility Kasus Pada Bank Syariah di DIY," *Sinergi: Kajian Bisnis dan Manajemen* 10, no.1 (Januari 2008).

²⁰Muhammad, *Sistem dan Prosedur Operasional Bank Islam* (Yogyakarta: UII Press, 2000), 5.

²¹Amirul Khoirudin, "Corporate Governance dan Pengungkapan *Islamic Social Reporting* Pada Perbankan Syariah Di Indonesia," *Accounting Analysis Journal* 2 (2) (2013).

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian sebelumnya

Beberapa karya ilmiah yang pernah dilakukan dengan penelitian tentang tata kelola perusahaan terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan guna membandingkan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti, sehingga dapat menjelaskan adanya perkembangan pemikiran antara satu penelitian dengan penelitian selanjutnya dalam memberikan kontribusi positif pada dunia akademis.

Penelitian yang dilakukan untuk menganalisis pengaruh *corporate governance* terhadap tingkat pengungkapan *corporate social responsibility* di Bank Islam Malaysia Berhad. Penelitian ini menggunakan variabel *corporate governance* (*Islamic Governance Score* (IG-SCORE) dan Proporsi *Investment Account Holders* (IAH)) sebagai variabel independen dan tingkat pengungkapan *corporate social responsibility* sebagai variabel dependen, serta menambahkan ukuran perusahaan sebagai variabel kontrol. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dokumenter. Pengujian hipotesis dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi berganda (*multiple regression*) dengan menggunakan SPSS 12. Berdasarkan dari hasil analisis dan

pengujian hipotesis, dapat ditarik kesimpulan: *islamic governance* memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap tingkat pengungkapan *corporate social responsibility* yang disajikan oleh Bank Islam Malaysia Berhad pada Laporan Keuangan Tahunannya, proporsi IAH (*Investment Account Holder*) memiliki pengaruh negatif yang tidak signifikan terhadap tingkat pengungkapan *corporate social responsibility* yang disajikan oleh Bank Islam Malaysia Berhad pada Laporan Keuangan Tahunannya, variabel kontrol berupa ukuran perusahaan yang digunakan dalam penelitian ini juga memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap tingkat pengungkapan *corporate social responsibility*, dari hasil analisis mengenai kondisi sosial masyarakat Malaysia dapat diambil kesimpulan bahwa kondisi sosial masyarakat juga mempengaruhi besarnya tingkat pengungkapan *corporate social responsibility*. Hal ini menjadi salah satu bukti bahwa akuntansi bukanlah sebuah ilmu yang *value free*. Namun, dalam penelitian ini sampel penelitian hanya pada satu Bank Syariah sehingga tidak bisa digeneralisasi hasilnya.

Penelitian yang dilakukan oleh Khoirudin²² melakukan pengukuran pengungkapan tanggung jawab sosial pada

²²Amirul Khoirudin, "Corporate Governance."

perbankan syariah masih mengacu pada *Global Reporting Initiative Index (GRI)*, padahal saat ini banyak diperbincangkan mengenai *Islamic Social Reporting* yang sesuai dengan prinsip syariah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh dari elemen *Good Corporate Governance* terhadap pengungkapan *Islamic Social Reporting* pada perbankan syariah di Indonesia. Populasi dari penelitian ini adalah seluruh bank umum syariah di Indonesia. Total sampel yang diuji sebanyak 10 bank umum syariah yang dipilih dengan metode *purposive sampling*. Teknik analisis dari penelitian ini menggunakan analisis deskriptif dan analisis inferensial. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ukuran dewan komisaris terbukti memiliki pengaruh positif signifikan terhadap pengungkapan *Islamic social reporting* pada perbankan syariah di Indonesia. Sedangkan ukuran dewan pengawas syariah tidak terbukti berpengaruh terhadap pengungkapan *Islamic social reporting* pada perbankan syariah di Indonesia.

Namun, dalam penelitian ini rentang waktu penelitian yang digunakan hanya dua tahun pengamatan, yaitu periode 2010 dan

2011, sehingga hanya 11 sampel yang dapat digunakan dan memungkinkan mempengaruhi pengungkapan CSR perusahaan, dan tidak semua variabel yang diduga mempengaruhi pengungkapan CSR diteliti mengingat keterbatasan informasi dan sumber data.

2.2 Konsep Good Corporate Governance

Menurut Arifin dalam Armi,²³ tujuan Good Corporate Governance (GCG) pada intinya adalah menciptakan nilai tambah bagi semua pihak yang berkepentingan. Adapun tujuan lain dari penerapan GCG yakni, mendorong agar dalam membuat keputusan dan menjalankan tindakan, agar dilandasi oleh nilai moral yang tinggi dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta kesadaran akan tanggung jawab sosial terhadap pemangku kepentingan.²⁴ Menurut FCGI (*Forum for Corporate Governance in Indonesia*) dalam Ana,²⁵ menyebutkan bahwa manfaat-manfaat yang akan diperoleh perusahaan dengan menerapkan tata kelola perusahaan yang baik antara lain yakni, lebih mudah untuk meningkatkan modal, dapat menurunkan biaya modal, meningkatkan kinerja bisnis dan

²³Armi Sulthon Fauzi, Ni Ketut Suransi, dan Alamsyah, "Pengaruh GCG Dan CSR Terhadap Nilai Perusahaan Dengan Profitabilitas Sebagai Variabel Pemoderasi," *Jurnal Infestasi* 12, no. 1 (Juni 2016), 4.

²⁴Muh. Arief Effendi, *The Power*, 61.

²⁵Ana Nurdiana, "Pengaruh Good Corporate Governance Dan Pengungkapan Corporate Social Responsibility Terhadap Nilai Perusahaan" (Skripsi tidak diterbitkan, Semarang: Program Strata Satu, Universitas Diponegoro, 2010), 3.

kinerja ekonomi, dan berdampak baik terhadap harga saham. Menurut Hidayah dalam Saiful,²⁶ keberadaan mekanisme *corporate governance* diharapkan dapat mengendalikan perilaku manajemen agar pengelolaan perusahaan dapat dilakukan secara terbuka/ transparan.

Prinsip-prinsip GCG

Sistem tata kelola organisasi perusahaan yang baik menuntut dibangun dan dijalankannya prinsip-prinsip tata kelola perusahaan (*corporate governance*), yang diharapkan perusahaan dapat hidup secara berkelanjutan dan memberikan manfaat bagi para *stakeholder*.^{27,28} Ada dua hal yang ditekankan dalam konsep GCG, pertama, pentingnya hak pemegang saham untuk memperoleh informasi dengan benar dan tepat pada waktunya dan, kedua, kewajiban perusahaan untuk melakukan pengungkapan (*disclosure*) secara akurat, tepat waktu, transparan terhadap semua informasi.²⁹

Beberapa prinsip GCG yang perlu diperhatikan menurut Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG) adalah:³⁰

- a. Keterbukaan (*transparency*), yaitu perusahaan harus menjaga objektivitas dalam menjalankan bisnis, serta menyediakan informasi yang material dan relevan dengan cara yang mudah diakses dan dipahami oleh pemangku kepentingan.
- b. Akuntabilitas (*Accountability*), perusahaan harus dapat mempertanggung jawabkan kinerjanya secara transparan dan wajar.
- c. Responsibilitas (*responsibility*), perusahaan harus mematuhi peraturan perundang-undangan serta melaksanakan tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan.
- d. Independensi (*independency*), perusahaan harus dikelola secara independen sehingga masing-masing organ

²⁶Saiful Amri, Andi Tri Haryono, dan M Mukery Warso, "Pengaruh *Good Corporate Governance* Terhadap Kinerja Karyawan PT. Aditec Cakrawiyasa Semarang," *Journal of Management* 2, no. 2 (Maret 2016), 3.

²⁷Yusriati Nur Farida, Yulia Prasetyo, dan Eliada Herwiyanti, "Pengaruh Penerapan *Corporate Governance* Terhadap Timbulnya *Earnings Management* Dalam Menilai Kinerja Keuangan Pada Perusahaan Perbankan Di Indonesia," *Jurnal Bisnis Dan Akuntansi* 12, no. 2 (Agustus 2010), 71.

²⁸Nurdin, N., & Mir'atun, M. a. (2018). Do Government And Private Sharia Commercial Banks

Practice Similar Financial Social Responsibility Disclosure? *HUNafa: Jurnal Studia Islamika*, 15(2), 285-321.

²⁹Thomas S. Kaihatu, "Good Governance Dan Penerapannya Di Indonesia," *Jurnal Manajemen Dan Kewirausahaan* 8, no. 1 (Maret 2006), 2.

³⁰Agung Rahmat, "Good Corporate Governance (GCG) Sebagai Prinsip Implementasi *Corporate Social Responsibility* (CSR): Studi Kasus Pada *Community Development Center* PT. Telkom Malang," *Jurnal Skripsi/FEB UB* (2013), 3.

perusahaan tidak saling mendominasi dan tidak dapat diintervensi oleh pihak lain.

- e. Kewajaran dan Kesetaraan (*fairness*), dalam melaksanakan kegiatannya perusahaan harus senantiasa memperhatikan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya berdasarkan asas kewajaran dan kesetaraan.

Aplikasi GCG di Indonesia

Implementasi GCG di Indonesia sangat terlambat jika dibandingkan dengan negara-negara lain mengingat masuknya konsep GCG di Indonesia relatif masih baru. Konsep *governance* mulai menguat di Indonesia pasca krisis ekonomi di paruh akhir tahun 1997 ditandai dengan ditandatanganinya *Letter of Intents* (LOI) antara Pemerintah Indonesia dengan lembaga donor *International Monetary Fund* (IMF) yang mensyaratkan perbaikan *governance* (publik maupun korporasi) sebagai syarat yang diberikan. Kemudian dipertegas dengan ditetapkannya Tap MPR No. VII tahun 2001 tentang visi Indonesia masa depan dalam bab IV ayat 9 butir a, yaitu *terwujudnya penyelenggaraan negara yang profesional, transparan, akuntabel, memiliki kredibilitas dan bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme* (KKN). LOI dan Tap MPR ini kemudian direspon oleh pemerintah untuk mewujudkan

good corporate governance dengan dikeluarkan perangkat-perangkat perundang-undangan dan peraturan pemerintah. Beberapa UU dan peraturan pemerintah yang berhubungan dengan *governance*, misalnya: UU No. 28 Tahun 1992 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari KKN, UU No. 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, dan UU No. 30 Tahun 2002 tentang komisi pemberantasan tindak pidana korupsi serta Inpres No. 7 Tahun 1999 tentang akuntabilitas kinerja lembaga pemerintahan. Selanjutnya “*statement*” pentingnya *governance* ini banyak muncul dalam UU, seperti UU No. 17 Tahun 2003 tentang keuangan negara dan UU No. 19 Tahun 2003 tentang BUMN. Memasuki abad ke 21 isu pentingnya penerapan praktik-praktik *corporate governance* diseluruh sektor semakin meningkat seiring dengan perlunya peningkatan daya saing dalam menghadapi pasar global.³¹

Pada April 2001, Komite Nasional Indonesia untuk Kebijakan Tata Kelola Perusahaan mengeluarkan Kode Tata Kelola Perusahaan yang Baik bagi masyarakat bisnis di Indonesia.³² Penerapan *good corporate governance* (GCG) di Indonesia dilakukan melalui tiga agenda utama, yaitu menetapkan kebijakan nasional, menyempurnakan

³¹Akhmad Syakhroza, *Corporate Governance*, 4.

³²Muh. Arief Effendi, *The Power*, 7.

kegiatan regulasi, dan membangun inisiatif sektor swasta.³³ Di Indonesia secara umum GCG terlihat dalam UU RI No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, dimana perusahaan adalah suatu badan hukum tersendiri dengan direksi dan komisaris yang mewakili perusahaan. Badan tertinggi didalam perusahaan adalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Ia memiliki wewenang untuk menyetujui atau menolak antara lain konsolidasi, merger, akuisisi, kepalitan, dan pembubaran perusahaan serta pengangkatan dan pemberhentian komisaris dan direksi.³⁴ Melalui surat edaran No SE.03 IPM/ 2000, yang diterbitkan tanggal 5 Mei 2000 disebutkan bahwa dalam rangka *good corporate governance*, perusahaan tercatat wajib memiliki komisaris independen, komite audit, dan sekretaris perusahaan (*corporate secretary*).³⁵

Dewan Direksi, Komisaris Independen dan Dewan Pengawas Syariah

1. Dewan Direksi

Dewan direksi (*board of directors*) berfungsi untuk mengurus perusahaan, dewan direksi dipilih oleh pemegang saham dalam

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang mewakili kepentingan para pemegang saham tersebut. Peran direksi sangat penting dan cukup menentukan bagi keberhasilan implementasi GCG. Diperlukan komitmen penuh dari dewan direksi agar implementasi GCG dapat berjalan dengan lancar sesuai dengan harapan.

Ketentuan tentang direksi BUMN diatur dalam UU No. 17 tahun 2003 tentang BUMN. Beberapa hal pokok yang diatur dalam UU tersebut antara lain adalah sebagai berikut:³⁶

- a. Pasal 16 mengenai pengangkatan direksi. Anggota direksi diangkat berdasarkan pertimbangan keahlian, integritas, kepemimpinan, kejujuran, perilaku, serta dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan persero.
- b. Pasal 17 mengenai pemberhentian direksi. Anggota direksi dapat diberhentikan sewaktu-waktu berdasarkan keputusan RUPS dengan menyebutkan alasannya.
- c. Pasal 19 mengenai kewajiban direksi. Dalam melaksanakan tugasnya, anggota direksi wajib mencurahkan tenaga,

³³Yustika Rini Tahsin, "Penerapan Prinsip-prinsip Good Corporate Governance (GCG) Pada PT. Bank Syaria'ah Cabang Pekanbaru Menurut Ekonomi Islam" (Skripsi tidak diterbitkan, Riau: Program Strata Satu, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2010), 1.

³⁴Jemsly Hutabarat dan Martani Huseini, *Proses, Formasi, dan Implementasi Manajemen*

Strategi Kontemporer Operasionalisasi Strategi (PT. Elex Media Komputindo: Jakarta, 2006), 47.

³⁵Etty Murwaningsih, "Hubungan Corporate Governance, Corporate Social Responsibility, dan Corporate Financial Performance Dalam Satu Continuum," *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan* 11, no. 1(Mei 2009), 32.

³⁶ Muh. Arief Effendi, *The Power*, 11.

pikiran, dan perhatian secara penuh pada tugas, kewajiban dan pencapaian tujuan persero.

- d. Pasal 25 mengenai larangan bagi direksi Anggota direksi dilarang memangku jabatan rangkap sebagai:
- 1) Anggota direksi BUMN, BUMD, badan usaha milik swasta dan jabatan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan
 - 2) Jabatan struktural dan fungsional lainnya pada instansi atau lembaga pemerintah pusat dan daerah; dan/atau
 - 3) Jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Tugas dan tanggungjawab direksi diatur pada Pasal 15 dalam Keputusan Menteri BUMN No. 117/M-MBU/2002 sebagai berikut:³⁷

- a. Direksi dalam melaksanakan tugasnya harus mematuhi Anggaran Dasar BUMN dan peraturan perundang-undangan yang berlaku
- b. Direksi bertugas untuk mengelola BUMN dan wajib mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham atau pemilik modal
- c. Setiap anggota direksi haruslah merupakan orang yang berwatak baik dan mempunyai kemampuan untuk melaksanakan tugas dengan sebaik-

baiknya sesuai dengan jabatan yang didudukinya

- d. Direksi harus melaksanakan tugasnya dengan baik demi kepentingan BUMN dan memastikan agar BUMN tersebut melaksanakan tanggungjawab sosialnya serta memerhatikan kepentingan dari berbagai pemangku kepentingan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku

Sementara Pasal 20 dari keputusan tersebut memuat larangan bagi anggota direksi untuk mengambil keuntungan pribadi. Pasal tersebut menyatakan bahwa para anggota direksi dilarang melakukan transaksi yang mempunyai konflik kepentingan dan mengambil keuntungan pribadi dari kegiatan BUMN yang dikelolanya, selain gaji dan fasilitas sebagai anggota direksi sebagaimana ditentukan oleh RUPS atau pemilik modal.

Menurut Pasal 1 dalam UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yang dimaksud dengan direksi adalah organ perseroan yang berwenang dan bertanggungjawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan, sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.

³⁷*Ibid.*, 11.

Berdasarkan Pasal 93 ayat (1) dalam undang-undang tersebut, yang dapat diangkat menjadi anggota direksi adalah orang perseroan yang cakap melakukan perbuatan hukum, kecuali dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pengangkatannya pernah:³⁸

- a. Dinyatakan pailit
- b. Menjadi anggota direksi atau anggota dewan komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkab suatu perseroan dinyatakan pailit, atau
- c. Pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan.

Transparansi anggota direksi diatur pada Pasal 101 ayat (1) dan (2). Pasal 101 (1) menyatakan bahwa anggota direksi wajib melaporkan kepada perseroan mengenai saham yang dimiliki anggota direksi yang bersangkutan dan/atau keluarganya dalam perseroan dan perseroan lain untuk selanjtnya dicatat dalam daftar khusus. Sementara Pasal 101 (2) menyatakan bahwa anggota direksi yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan menimbulkan kerugian bagi perseroan, bertanggungjawab secara pribadi atas kerugian perseroan tersebut.

2. Dewan Komisaris Independen

Dewan komisaris (*board of commissioner*) berfungsi untuk melakukan pengawasan, selain itu komisaris independen (*independent commissioner*) berfungsi sebagai kekuatan penyeimbang (*contreveiling power*) dalam pengambilan keputusan oleh dewan komisaris. Dewan komisaris dipilih oleh pemegang saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang mewakili kepentingan para pemegang saham tersebut. Peran komisaris sangat penting dan cukup menentukan bagi keberhasilan implementasi GCG. Diperlukan komitmen penuh dari dewan komisaris agar implementasi GCG dapat berjalan dengan lancar sesuai dengan harapan.

Dalam kaitannya dengan implementasi GCG di perusahaan, diharapkan bahwa keberadaan komisaris maupun komisaris independen tidak hanya sebagai pelengkap, karena dalam diri komisaris melekat tanggungjawab secara hukum. Oleh karena itu, peranan komisaris independen sangatlah penting. Namun, dalam praktik yang selama ini terjadi di Indonesia, terdapat kecenderungan bahwa komisaris seringkali melakukan intervensi terhadap direksi dalam menjalankan tugasnya.

Bagi setiap calon emiten yang akan mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Jakarta (sekarang PT Bursa Efek Indonesia), PT

³⁸*Ibid.*, 12.

Bursa Efek Indonesia mewajibkan adanya komisaris independen dalam struktur kepengurusan emiten tersebut. Komisaris dalam peraturan Bursa Efek butir 1-a dari Peraturan Pencatatan Efek No. 1-A PT Bursa Efek Indonesia mengenai Ketentuan Umum Pencatatan Efek yang Bersifat Ekuitas di Bursa mengatur tentang rasio komisaris independen. Dalam butir tersebut menyatakan bahwa jumlah komisaris independen haruslah secara proporsional sebanding dengan jumlah saham yang dimiliki oleh pihak yang bukan merupakan pemegang saham pengendali, dengan ketentuan bahwa jumlah komisaris independen sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh persen) dari seluruh jumlah komisaris.

Butir 2 dari peraturan tersebut mengatur mengenai persyaratan komisaris independen. Butir tersebut menyatakan bahwa komisaris independen dilarang untuk memiliki hubungan terafiliasi baik dengan pemegang saham pengendali, direktur, maupun komisaris lainnya dan untuk bekerja rangkap dengan perusahaan terafiliasi. Selain itu, komisaris independen diharuskan untuk memahami peraturan perundang-undangan dibidang pasar modal.³⁹

Kedua hal tersebut menunjukkan bahwa komisaris independen mewakili

kepentingan minoritas, sehingga diharapkan menjadi penyeimbang dalam pengawasan perusahaan publik. Menurut otoritas PT Bursa Efek Indonesia, sampai dengan bulan Oktober 2004 sekitar 99% emiten sudah mengangkat komisaris independen. Hanya tinggal sekitar 15 perusahaan saja yang belum menerapkan prinsip GCG karena belum mengangkat komisaris independen dalam perusahaannya. Pada saat itu, otoritas bursa memberikan batas waktu (toleransi) hingga akhir tahun 2004 kepada perusahaan yang bersangkutan untuk segera mengangkat komisaris independen.⁴⁰

3. Dewan Pengawas Syariah

Pengawasan terhadap kepatuhan prinsip syariah oleh bank syariah dilakukan oleh lembaga pengawasan tersendiri, yaitu Dewan Pengawas Syariah (DPS). DPS adalah suatu badan yang diberi wewenang untuk melakukan pengawasan dan melihat secara dekat aktivitas lembaga keuangan syariah agar lembaga tersebut senantiasa mengikuti aturan dan prinsip-prinsip syariah, yaitu tidak menyimpang dari fatwa MUI yang telah dikeluarkan.

Dalam UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, DPS tidak termasuk organ perseroan. Organ perseroan merupakan unsur utama yang melaksanakan

³⁹*Ibid.*, 16.

⁴⁰*Ibid.*, 17.

kegiatan perseroan terdiri dari 3 (tiga) unsur, yaitu Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), direksi dan dewan komisaris. Walaupun DPS bukan merupakan organ perseroan, peraturan ini menegaskan bahwa setiap perseroan yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah **wajib** memiliki DPS. Sebagai unsur wajib, posisi DPS ditempatkan **setara** dengan posisi dewan komisaris.⁴¹

Berdasarkan Pasal 32 ayat (3) UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, tugas utama DPS adalah memberikan nasihat dan saran pada direksi, serta mengawasi kegiatan bank terhadap kepatuhan syariah. Terkait dengan luas lingkup pengawasan kepatuhan syariah, fungsi pengawasan yang dilakukan oleh DPS harus mencakup 2 (dua) hal, yaitu pengawasan terhadap produk yang dikeluarkan dan pengawasan terhadap operasional bank syariah. Kedua lingkup pengawasan ini diformalkan dalam ketentuan perundang-undangan dari Pasal 35 ayat (2) Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/3/PBI/2009 tentang Bank Umum Syariah dan Pasal 29 ayat (2) Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/23/PBI/2009 tentang Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.⁴²

a. Pengawasan terhadap produk bank syariah

Pengawasan terhadap produk dilakukan dalam 2 (dua) tahap:

1) Tahap sebelum penawaran (*ex-ante*). Dalam tahap ini, DPS melakukan pengawasan dengan cara:

- a) Menilai dan memastikan pedoman produk yang dikeluarkan bank (hanya bank umum syariah)
- b) Meminta fatwa kepada Dewan Syariah Nasional (DSN) untuk produk baru bank yang belum ada fatwanya

2) Tahap pada saat dan setelah produk ditawarkan (*ex-post*). Dalam tahap ini DPS melakukan pengawasan dengan cara:

- a) Mengawasi proses pengembangan produk baru bank
- b) Melakukan *review* secara berkala atas pemenuhan prinsip syariah terhadap mekanisme penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa bank

b. Pengawasan terhadap operasional bank DPS melakukan pengawasan operasional bank dengan cara:

- 1) Melakukan *review* secara berkala atas pemenuhan prinsip syariah terhadap

⁴¹Haniah Ilhamai, "Pertanggungjawaban Dewan Pengurus Syariah Sebagai Otoritas Pengawas Kepatuhan Syariah Bagi Bank Syariah," (on-line) (<https://journal.ugm.ac.id/jmh/article/download/16274/10820>), (diakses 9 Agustus 2017), 486.

⁴²*Ibid.*, 485.

mekanisme penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa bank

- 2) Meminta data dan informasi terkait dengan aspek syariah dari satuan kerja bank dalam rangka pelaksanaan tugasnya

Dari ketentuan tersebut, maka luas pengawasan DPS telah diatur secara tegas dan memiliki kekuatan hukum yang tepat. Pelanggaran terhadap ketentuan ini diancam dengan sanksi administratif.

A. Tanggungjawab Sosial Perusahaan

Hadirnya perusahaan di tengah masyarakat memiliki peranan yang cukup besar yang mana diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.⁴³ Setiap perusahaan perlu memiliki tanggung jawab sosial, baik yang berhadapan dengan lingkungan organisasi bisnisnya maupun lingkungan yang secara tak langsung terkait dengan organisasi bisnis. Dari aspek ekonomi, perusahaan harus berorientasi mendapatkan keuntungan dan dari aspek sosial perusahaan harus memberikan

kontribusi secara langsung kepada masyarakat.⁴⁴ Pada intinya, setiap organisasi atau perusahaan pada akhirnya perlu menyadari bahwa apapun yang dilakukannya merupakan reaksi atau tuntutan dari lingkungan atau juga sebaliknya merupakan upaya untuk memengaruhi lingkungannya.⁴⁵ Tanggung jawab (*responsibility*) adalah keharusan untuk melakukan semua kewajiban/tugas-tugas yang dibebankan kepadanya sebagai akibat dari wewenang yang diterima atau dimilikinya.⁴⁶

Menurut ISO 26000 dalam I Made dan Putu Ayu,⁴⁷ tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) adalah tanggung jawab sebuah organisasi terhadap dampak dari keputusan-keputusan dan kegiatan-kegiatannya pada masyarakat dan lingkungan, yang diwujudkan dalam bentuk perilaku transparan dan etis, yang sejalan dengan pembangunan berkelanjutan dan kesejahteraan masyarakat, mempertimbangkan harapan pemangku kepentingan, sejalan dengan hukum yang

⁴³Putu Ari Ratnadewi dan I G.K Agung Ulupui, "Mekanisme *Corporate Governance* Sebagai Variabel Pemoderasi Pengaruh Pengungkapan *Corporate Social Responsibility* Pada Nilai Perusahaan," *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana* 14. no. 1 (Januari 2016), 549.

⁴⁴Anggara Fahrizqi, "*Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Pengungkapan Corporate Social Responsibility (CSR) Dalam Laporan Tahunan Perusahaan: Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Dalam Bursa Efek Indonesia*" (Skripsi tidak diterbitkan, Semarang: Program Strata Satu, Universitas Diponegoro, 2010), 1.

⁴⁵Erni Tisnawati Sule dan Kurniawan Saefullah, *Pengantar Manajemen* (Jakarta: Kencana, 2005), 76.

⁴⁶Malayu S.P. Hasibuan, *Manajemen: Dasar, Pengertian, dan Masalah* (Ed. Revisi, Cet. 6, Jakarta: Bumi Aksara, 2007), 70.

⁴⁷I Made Sudana dan Putu Ayu Arlindinia W, "*Corporate Governance Dan Pengungkapan Corporate Social Responsibility Pada Perusahaan Go-Public Di Bursa Efek Indonesia*," *Jurnal Manajemen Teori Dan Terapan* 4, no. 1 (April 2011), 38.

ditetapkan dan norma-norma perilaku internasional, serta terintegrasi dengan organisasi secara menyeluruh. Sembiring dalam Erna dan Sofie,⁴⁸ menjelaskan tanggung jawab sosial merupakan proses pengkomunikasian dampak sosial dan lingkungan dari kegiatan ekonomi organisasi terhadap kelompok khusus yang berkepentingan dan terhadap masyarakat secara keseluruhan.

Dalam kajian ini dikatakan oleh Harap, Sofyan, Safri dalam Bayu⁴⁹ bahwa berbagai dasar perusahaan melakukan tanggung jawab sosial perusahaan yaitu :

1. Keterlibatan sosial perusahaan terhadap masyarakat dalam memenuhi panggilan bahwa dirinya memiliki kepekaan terhadap masalah sosial di tengah masyarakat.
2. Meningkatkan nama baik perusahaan (citra perusahaan), simpati masyarakat, karyawan dan investor, sehingga berharap *Feed Back* secara ekonomi.

3. Menghindari campur tangan pemerintah dalam melindungi masyarakat.
4. Meningkatkan respon positif, norma dan nilai masyarakat yang sesuai dengan kehendak investor.
5. Membantu program pemerintah seperti konservasi, pelestarian budaya, peningkatan pendidikan, lapangan kerja dan lain sebagainya.

Menurut Kotler dan Lee dalam Ahmad dan Antonius,⁵⁰ manfaat yang diperoleh perusahaan dengan melakukan kegiatan CSR yakni meningkatkan penjualan⁵¹ dan *market share*, memperkuat *brand positioning*, meningkatkan kemampuan perusahaan untuk memotivasi dan mempertahankan karyawan, serta menurunkan biaya operasional.

2.3 Pendekatan Teori

Jensen dan Meckling dalam Alif⁵² menyatakan bahwa hubungan keagenan adalah sebuah kontrak antara manajer (*agent*)

⁴⁸Erna Agustin Roziani dan Sofie, "Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Tingkat Pengungkapan Sosial Dalam Laporan Tahunan Bank Konvensional Dan Bank Syariah Di Indonesia," *TAZKIA| Islamic Finance & Business Review* 5, no. 1 (Januari—Juli 2010), 61.

⁴⁹Bayu Bajra, Zainul Arifin, dan Sunatri, "Analisis Pengaruh CSR (*Corporate Social Responsibility*) Terhadap Citra Perusahaan: Studi Kasus Pada Masyarakat Sekitar PT. Adora Indonesia Di Kalimantan Selatan," *Jurnal Administrasi Bisnis (JAB)* 30. no. 1 (Januari 2015), 189.

⁵⁰Ahmad Kamil dan Antonius Herusetya, "Pengaruh Karakteristik Perusahaan Terhadap Luas

Pengungkapan Kegiatan *Corporate Social Responsibility*," *Media Riset Akuntansi* 2. no. 1 (Februari 2012), 2.

⁵¹Survey Global yang dilakukan oleh *The Economics Intelligence Unit* menunjukkan bahwa 85% eksekutif senior dan investor dari berbagai organisasi menjadikan CSR sebagai pertimbangan utama dalam pengambilan keputusan, Lihat Warta Ekonomi dalam Novita Indrawati, "Pengungkapan *Corporate Social Responsibility* (CSR) Dalam *Annual Report* Serta Pengaruh *Political Visibility* Dan *Economic Performance*," *Pekbis Jurnal* 1, no. 1 (Maret 2009), 1.

⁵²Alif Romadhon Putro, "Pengaruh *Profitabilitas*, *Kepemilikan Institusional*, *Pajak*, Dan

dengan investor (*principal*). Hubungan kontraktual antara pihak yang mendelegasikan pengambilan keputusan tertentu dengan yang menerima pendelegasian tersebut.⁵³ *Agency theory* menjelaskan pentingnya pemilik perusahaan menyerahkan pengelolaan perusahaan kepada tenaga-tenaga profesional (disebut *agents*) untuk menjalankan bisnisnya.⁵⁴ Teori keagenan memprediksi bahwa pemilihan kebijakan pengungkapan informasi tanggung jawab sosial dalam hubungan keagenan dipengaruhi oleh 3 faktor yakni, visibilitas politis, biaya pengawasan atau *monitoring cost*; dan biaya kontrak atau *contracting cost*.⁵⁵

Eisenhardt dikutip dalam Isnanta dalam Perminas dan Deresti,⁵⁶ menggunakan tiga asumsi sifat dasar manusia guna menjelaskan tentang teori agensi yaitu: (1) manusia pada umumnya mementingkan diri sendiri (*self interest*), (2) manusia memiliki

daya pikir terbatas mengenai persepsi masa mendatang (*bounded rationality*), dan (3) manusia selalu menghindari risiko (*risk averse*). Berdasarkan asumsi sifat dasar manusia tersebut, manajer sebagai manusia kemungkinan besar akan bertindak berdasarkan sifat *opportunistic*, yaitu mengutamakan kepentingan pribadinya.

Selain itu Teori Agensi juga menjelaskan mengenai masalah asimetris informasi. Manajer sebagai pengelola perusahaan lebih banyak mengetahui informasi internal dan prospek perusahaan di masa yang akan datang dibandingkan pemilik (pemegang saham). Oleh karena itu sebagai pengelola, manajer diwajibkan memberi sinyal mengenai kondisi perusahaan kepada pemilik. Akan tetapi informasi yang disampaikan terkadang diterima tidak sesuai dengan kondisi perusahaan sebenarnya. Kondisi ini dikenal sebagai informasi yang tidak simetris atau asimetri informasi.⁵⁷

Kualitas Good Corporate Governance Terhadap Manajemen Laba: Studi Empiris Pada Perusahaan Go Publik Yang Terdaftar Dalam Penilaian IICG Pada Tahun 2011-2013" (Skripsi tidak diterbitkan, Surakarta: Program Strata Satu, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2016), 5.

⁵³Dwi Fatimatuzahra, "Analisis Perbandingan Pengungkapan *Corporate Social Responsibility* Antara Bank Syariah Indonesia Dengan Bank Syariah Malaysia," (Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang), 4.

⁵⁴Feri Ferial, Suhadak, dan Siti Ragil Handayani, "Pengaruh *Good Corporate Governance* Terhadap Kinerja Keuangan Dan Efeknya Terhadap Nilai Perusahaan: Studi Pada Badan Usaha Milik

Negara Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2012-2014," *Jurnal Administrasi Bisnis (JAB)* 33. no. 1 (April 2016), 147.

⁵⁵Ade Andriani, "Pengaruh Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Terhadap Kualitas Pengungkapan Informasi Tanggung Jawab Sosial Dan Dampaknya Pada Nilai Perusahaan: Studi Empiris Pada Perusahaan Publik Di Bursa Efek Indonesia," *Jurnal Wawasan Manajemen* 3, no. 1 (Februari 2015), 19.

⁵⁶Perminas Pangeran dan Deresti Salaunaung, "Praktek Tata Kelola dan Kepemilikan Institusional: Bukti Emperis Dari Sektor Industri Perbankan," *Jurnal Akuntansi XX*, no. 02 (Mei 2016), 219.

⁵⁷*Ibid.*, 219.

Teori keagenan mengemukakan bahwa antara pihak *principal* (pemilik) dan *agent* (manajer) memiliki kepentingan yang berbeda sehingga memunculkan konflik yang dinamakan konflik keagenan (*agency conflict*). Menurut Lambert dalam I Gusti Agung dan G Agus,⁵⁸ Perusahaan yang memisahkan fungsi kepemilikan dan pengelolaan perusahaan akan rentan terhadap konflik keagenan. Konflik kepentingan antara pemegang saham dan manajemen dapat timbul karena kemungkinan agen tidak selalu melakukan hal-hal yang sesuai dengan kepentingan *principal* sehingga dapat memicu konflik.

Masalah agensi yang disebabkan karena konflik kepentingan dan asimetri informasi ini, maka perusahaan harus menanggung biaya keagenan. Jensen dan Meckling dalam Perminas dan Deresti,⁵⁹ menjelaskan biaya keagenan dalam tiga jenis yaitu: (1) Biaya *Monitoring*, merupakan biaya yang dikeluarkan untuk melakukan pengawasan terhadap aktivitas-aktivitas yang dilakukan oleh agen; (2) Biaya pengikatan (*bonding cost*), merupakan biaya untuk

menjamin bahwa agen tidak akan bertindak merugikan *principal*, atau dengan kata lain untuk meyakinkan agen, bahwa *principal* akan memberikan kompensasi jika agen benar-benar melakukan tindakan tersebut; (3) Biaya kerugian residual, merupakan nilai uang yang ekuivalen dengan pengurangan kemakmuran yang dialami oleh *principal* akibat dari perbedaan kepentingan.

Struktur kepemilikan merupakan salah satu aspek *corporate governance* yang dipandang sebagai mekanisme kontrol yang tepat untuk mengurangi konflik keagenan karena dapat meningkatkan proses *monitoring* dalam perusahaan.⁶⁰ *Corporate governance* merupakan salah satu elemen kunci dalam meningkatkan efisiensi ekonomis, yang meliputi serangkaian hubungan dan pengungkapan informasi yang lengkap antara manajemen perusahaan, dewan komisaris, para pemegang saham, dan *stakeholders* lainnya.⁶¹

2.4 Islam dan Tata Kelola Perusahaan

Dalam perspektif Islam *good corporate governance* dikenal dengan istilah

⁵⁸I Gusti Agung Ayu Pramita Indraswari dan G Agus Indra Tenaya, "Pengaruh *Leverage*, Tata Kelola dan Karakteristik Perusahaan Pada Perataan Laba Perusahaan Yang Terdaftar di Bursa efek Indonesia," *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayan* 14, (Januari 2016), 487.

⁵⁹*Ibid.*, 220.

⁶⁰Ni Wayan Rustiarini, "Pengaruh Struktur Kepemilikan Saham Pada Pengungkapan *Corporate Social Responsibility*" (Jurusan Akuntansi Fakultas

Ekonomi Universitas Mahasaraswati Denpasar, Bali, 2011), 4.

⁶¹Cynthia Dwi Putri, "Pengaruh *Corporate Governance* dan Karakteristik Perusahaan Terhadap Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di Dalam *Sustainability Report*: Studi Empiris Perusahaan yang Terdaftar di BEI" (Skripsi diterbitkan, Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang, Padang, 2013), 4.

god corporate governance. *God corporate governance* merupakan sebuah sistem tata kelola perusahaan yang berdasarkan pada paradigma tauhid, dan digagas untuk menjadi alternatif *corporate governance* dalam perusahaan kapitalis yang didasarkan pada pemikiran syirik.⁶² Esensi dari *god corporate governance* adalah mendahulukan pengawasan iman dari pengawasan raja, menghubungkan suara hati dengan kerja sehingga pekerjaan menjadi suci (*sacred*).

Tata Kelola Perusahaan yang berketuhanan adalah hasil dari interaksi antara dinamika spiritual individu dan faktor-faktor kelembagaan. Karena itu, tanggung jawab perusahaan mencakup tidak hanya terhadap konsumen, pegawai, pemasok, dan pemerintah, tetapi juga terhadap generasi selanjutnya, makhluk lain, dan pada akhirnya kepada Tuhan. Luasnya aktor dan sektor yang menjadi rujukan tanggung jawab sosial perusahaan dengan model *governance* perusahaan juga lebih interaktif, yakni menyatukan dimensi meteril dan spiritual serta individual dan kelembagaan.⁶³

3. METODOLOGY

Berdasarkan tujuannya penelitian ini termasuk penelitian verifikasi dengan pendekatan kuantitatif. Yang mana bertujuan untuk mengetahui kemungkinan hubungan peristiwa atau gejala yang satu dengan yang lainnya setelah adanya perlakuan terhadap peristiwa atau gejala tersebut. Adanya perlakuan terhadap subyek penelitian akan memberikan dampak atau akibat tertentu pada subyek tersebut.⁶⁴ Dalam hal ini, penulis akan melakukan penelitian pada 4 (empat) Bank Umum Syariah di Indonesia.

Populasi dan Sampel

Populasi penelitian adalah jumlah dari keseluruhan dari obyek penelitian yang akan diteliti.⁶⁵ Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh bank umum syariah yang ada di Indonesia yang tercatat sampai dengan tahun 2016 yakni berjumlah 13 (sebelas)⁶⁶ Bank Umum Syariah.

Teknik pengambilan sampel dilakukan secara *purposive sampling* dengan tujuan agar relevan dengan tujuan penelitian, sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan.⁶⁷ Adapun kriteria yang digunakan untuk

⁶² Sanerya Hendrawan, *Spiritual Management*, Cet. I (Bandung: Pt. Mizan Pustaka, 2009), 201.

⁶³ *Ibid.*, 222.

⁶⁴ Supardi, *Metodologi Penelitian Ekonomi Bisnis* (Yogyakarta: UII Press, 2005), 32.

⁶⁵ Subagyo dan Djarwanto, *Statistika Induktif* (Yogyakarta: BPFY Yogyakarta, 2005), 93.

⁶⁶ Otoritas Jasa Keuangan (OJK), *Statistik Perbankan Syariah*, (Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan, 2015), 2.

⁶⁷ Husaini Usman dan Purnomo Setiady Akbar, *Pengantar Statistik*, Edisi kedua (Jakarta: Pt. Bumi Aksara, 2011), 186.

menentukan sampel adalah seluruh bank umum syaria'ah yang tercatat sampai tahun 2016 dan masuk dalam kategori Bank Umum Swasta Nasional (BUSN) Devisa, menerbitkan laporan tahunan dari periode 2012-2015, dan melaksanakan CSR. Atas dasar kriteria di tersebut diperoleh jumlah sampel sebanyak 4 (empat) bank umum syariah yaitu Bank Negara Indonesia Syariah, Bank Syariah Mega Indonesia, Bank Syariah Mandiri dan Bank Muamalat Indonesia.

Sumber Data

Data adalah informasi yang akan diolah dan digunakan untuk membuktikan kebenaran teori, menyimpulkan tentang sesuatu maupun mencari jawaban atas hipotesa yang diajukan.⁶⁸ Dalam penelitian ini dilakukan studi eksplorasi terhadap data yang relevan dengan obyek kajian yang bersumber dari data primer dan data sekunder. Data primer dalam penelitian ini berupa data laporan tahunan (*annual report*) yang telah diaudit. Untuk memperoleh data primer peneliti melakukan penelusuran yang bisa diakses melalui laporan publikasi Bank Indonesia yang berhubungan dengan obyek yang diteliti dan laporan tahunan masing-masing bank syariah yaitu pada situs www.syariahmandiri.com,

www.bnisyariah.com, www.bsmi.com dan www.bankmuamalat.com.⁶⁹

Sedangkan data sekunder dikumpulkan melalui kajian pustaka (*library research*) dilakukan dengan cara mencari buku-buku literatur yang relevan, melakukan penelusuran jurnal-jurnal nasional untuk mendukung penelitian ini khususnya yang menyangkut GCG.

Analisis data di lakukan dengan menggunakan SPSS. Hasil perhitungan SPSS digunakan untuk menguji hipotesis dengan model regresi linear berganda dan harus menghindari adanya penyimpangan asumsi klasik. Pengujian asumsi klasik ini dimaksudkan agar variabel independen yang menjadi estimator atas variabel dependen tidak bias. Apabila tidak ada gejala asumsi klasik yaitu normalitas, multikolinearitas, heteroskedastisitas, dan autokorelasi dalam pengujian hipotesis dengan model yang digunakan, maka diharapkan dapat menghasilkan suatu model yang baik sehingga hasil analisisnya juga baik dan tidak bias.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

⁶⁸Syamsul Hadi, *Metodologi Penelitian Untuk Akuntansi dan Keuangan* (Yogyakarta: Ekonosia, 2006), 37.

⁶⁹Jika ditinjau dari segi cakupan waktu, data dalam penelitian ini merupakan data *pooling* atau data

panel yaitu data yang waktunya lebih dari satu waktu tertentu dan merupakan urutan seperti halnya runtut waktu (*time series*). Lihat Syamsul Hadi dalam Ali, *Pengaruh Tanggungjawab Sosial*, 12.

4.1 Gambaran Objek Penelitian

Penelitian dilakukan pada Bank Umum Syariah Indonesia dengan menentukan perusahaan-perusahaan sektor perbankan pada tahun 2012-2015 sebagai populasi penelitian. Prosedur penentuan sampel dengan menggunakan *purposive sampling*.

Tabel 1. Sampel penelitian

No	Kriteria	Jumlah
1	Bank umum syariah yang terdaftar direktori Bank Indonesia periode 2012-2015	13
2	Kategori Bank Umum Swasta Nasional (BUSN) Devisa	5
3	menerbitkan laporan tahunan dari periode 2012-2015, dan melaksanakan CSR.	4
Perusahaan yang menjadi sampel		4

4.2 Hasil Analisis

Variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian mini meliputi Proporsi dewan komisaris independen, ukuran dewan direksi, dan ukuran dewan pengawas syariah sebagai variable independen. Sedangkan variable dependen yaitu *corporate social reponsibility* yang diukur dengan ISR. Variabel tersebut akan diuji secara deskriptif seperti berikut ini :

Tabel 2. Statistik deskriptif

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
DKI	12	.3	3.0	1.317	1.1028
DD	12	3.0	8.0	4.750	1.4848
DPS	12	2.0	3.0	2.667	.4924
ISR	12	54.00	72.00	62.8333	6.73975
Valid N	12				

Nilai rata-rata dewan komisaris independen sebesar 1,317, dewan komisaris independen minimum sebesar 0,3 dan dewan komisaris independen maksimum sebesar 3,0 sedangkan standar deviasi dewan komisaris independen sebesar 1,1028.

Nilai rata-rata dewan direksi sebesar 4,750, dewan direksi minimum sebesar 3,0 dan dewan direksi maksimum sebesar 8,0 sedangkan standar deviasi dewan direksi sebesar 1,4848.

Nilai rata-rata dewan pengawas syariah sebesar 2,667, dewan komisaris independen minimum sebesar 2,0 dan dewan pengawas syariah maksimum sebesar 3,0 sedangkan standar deviasi dewan pengawas syariah sebesar 0,4924.

Tingkat mean pengungkapan CSR sebesar 62,833, CSR minimum sebesar 54,0 dan CSR maksimum sebesar 72,0 sedangkan standar deviasi dewan komisaris independen sebesar 6,7397.

4.3 Pengujian hipotesis

Pengujian hipotesis merupakan langkah- langkah atau prosedur yang dilakukan dengan tujuan untuk memutuskan apakah hipotesis diterima atau ditolak. Secara rinci hasil pengujian hipotesis dijabarkan sebagai berikut:

Uji Koefisien Determinasi (R²)

Pengujian hipotesis pertama dilakukan dengan melihat nilai koefisien

regresi pada model summary. Koefisien determinasi (R^2) pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Koefisien determinasi yang digunakan adalah nilai koefisien determinasi yang disesuaikan atau adjusted R^2 . Nilai adjusted R^2 berkisar antara 0 sampai 1, semakin nilai tersebut mendekati angka 1 maka pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen semakin erat.

Adjusted R^2 dihitung dengan cara mengalikan adjusted R^2 dengan 100% (adjusted $R^2 \times 100\%$). Berdasarkan tabel, adjusted R^2 sebesar 0,637 atau 63,7%. Nilai adjusted R^2 tersebut berarti menunjukkan persentase sumbangan pengaruh variabel *Good Corporate Governance* terhadap Pengungkapan ISR adalah 63,7%, sedangkan sisanya sebesar 36,3% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak digunakan dalam penelitian ini. Hasil pengujian juga menunjukkan nilai R atau koefisien korelasi yang menunjukkan besarnya hubungan antara variabel independen dan variabel dependen. Nilai R sebesar 0,858 menunjukkan hubungan yang cukup kuat antara variabel dependen dengan variabel independen. Semakin nilai R mendekati 1, maka semakin kuat pula hubungan variabel dependen dengan variabel independen.

Uji F

Dilakukan untuk mengetahui apakah variabel yang digunakan dalam model regresi memiliki pengaruh signifikan terhadap ISR. Semua variabel diuji secara bersama. Jika variabel bebas memiliki pengaruh secara simultan terhadap variabel terikatnya maka model persamaan regresi masuk dalam kriteria cocok atau fit. Sebaliknya jika tidak terdapat pengaruh secara simultan maka masuk dalam kategori tidak cocok atau non fit.

Pada output ANOVA pada tabel Uji model Regresi secara Simultan Y ISR diperoleh F hitung sebesar 0,699 dan F tabel dengan (df) $n_1 = 3$ dan $n_2 = 8$ adalah 4,07. F hitung lebih besar dari F tabel ($7,436 < 4,07$) maka secara simultan *good corporate governance* tidak berpengaruh terhadap pengungkapan *corporate social responsibility* pada bank umum syariah milik pemerintah. Pengaruh secara simultan juga dapat dilihat dengan membandingkan nilai Sig. dengan α . Berdasarkan tabel di atas diperoleh nilai Sig. sebesar 0,011 dibawah $\alpha = 0,05$ maka dapat disimpulkan juga terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel *good corporate governance* terhadap pengungkapan tanggungjawab sosial perusahaan.

Uji T

Uji t digunakan untuk mengetahui apakah masing-masing variabel bebas pembentuk model regresi secara individu

memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pengungkapan tanggungjawab sosial perusahaan. Apakah variabel tersebut memiliki pengaruh yang berarti terhadap variabel terikatnya atau tidak.

Hasil pengujian parsial (uji t) antara komisaris independen dengan pengungkapan CSR menunjukkan nilai t hitung sebesar -4,441 dengan nilai signifikansi sebesar 0,002 yang lebih kecil dari $\alpha = 0,05$. Artinya bahwa variabel komisaris independen berpengaruh positif dan signifikan pada pengungkapan CSR. Dapat disimpulkan bahwa jumlah komisaris independen akan mempengaruhi pengungkapan CSR dalam suatu perusahaan. Dengan demikian **H₁ “Komisaris Independen berpengaruh positif pada pengungkapan CSR” diterima.**

Hasil pengujian parsial (uji t) antara dewan direksi dengan pengungkapan CSR menunjukkan nilai t hitung sebesar -2,957 dengan nilai signifikansi sebesar 0,018 yang lebih kecil dari $\alpha = 0,05$. Artinya bahwa variabel dewan direksi berpengaruh positif dan signifikan pada pengungkapan CSR. Dapat disimpulkan bahwa jumlah dewan direksi akan mempengaruhi pengungkapan CSR dalam suatu perusahaan. Dengan demikian **H₂ “Dewan Direksi berpengaruh positif pada pengungkapan CSR” diterima.**

Hasil pengujian parsial (uji t) antara dewan pengawas syariah dengan

pengungkapan CSR menunjukkan nilai t hitung sebesar 1,464 dengan nilai signifikansi sebesar 0,181 yang lebih besar dari $\alpha = 0,05$. Artinya bahwa variabel dewan pengawas syariah berpengaruh negatif dan tidak signifikan pada pengungkapan CSR. Dapat disimpulkan bahwa berapapun jumlah dewan pengawas syariah tidak akan mempengaruhi pengungkapan CSR dalam suatu perusahaan. Dengan demikian **H₃ “Dewan Pengawas Syariah berpengaruh positif pada pengungkapan CSR” ditolak.**

Sehingga hasil atau output dari analisis regresi dengan menggunakan SPSS yang terlihat dalam tingkat signifikansi variabel regresi, maka dapat disusun sebuah persamaan regresi ganda sebagai berikut:

$$Y = 76,00 + -6,827 \text{ DKI} + -3,788 \text{ DD} + 5,181 \text{ DPS}$$

Y merupakan variabel dependen yang menunjukkan Pengungkapan *Corporate Social Responsibility*, sedangkan variabel bebas dalam persamaan regresi tersebut adalah X_1 yang menerangkan komposisi dewan komisaris independen dan X_2 yang menerangkan komposisi dewan direksi, serta X_3 merupakan komposisi dewan pengawas syariah.

4.4 Pembahasan

Dari hasil pengujian pengaruh komisaris independen terhadap pengungkapan CSR, dapat dinyatakan bahwa

terdapat pengaruh positif yang signifikan terhadap pengungkapan CSR. Hal ini menunjukkan bahwa jumlah komisaris independen akan mempengaruhi pengungkapan CSR dalam suatu perusahaan dan pengawasan yang dilakukan atas kebijakan dan peraturan yang telah dibuat dapat dilakukan secara efektif guna mengawasi tingkah laku pihak manajemen dalam menjalankan tugasnya yang disajikan dalam laporan tahunan bank terkait guna memenuhi kebutuhan laporan untuk para *stakeholder*.

Hasil ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Amirul Khoirudin⁷⁰ yang menyatakan bahwa dewan komisaris independen berpengaruh positif terhadap pengungkapan CSR. Amirul Khoirudin berasumsi bahwa dewan komisaris memiliki peran yang penting karena bertugas mengawasi perusahaan dan menyampaikan semua informasi kepada *stakeholders*, termasuk informasi pengungkapan tanggung jawab sosial. Terkait dengan pengungkapan informasi oleh perusahaan, semakin besar ukuran dewan komisaris, maka pengawasan

akan semakin baik. Dengan pengawasan yang baik, maka diharapkan pengungkapan ISR akan semakin luas karena dapat meminimalisir informasi yang mungkin dapat disembunyikan oleh manajemen.

Riha Dedi Priantana dan Ade Yustian⁷¹ dalam penelitiannya menunjukkan komposisi dewan komisaris independen berpengaruh positif terhadap pengungkapan CSR dengan asumsi bahwa jumlah komposisi dewan komisaris independen akan mempengaruhi perusahaan dalam pengungkapan CSR dalam laporan tahunannya.

Hasil penelitian ini bertentangan dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Lu'liyatul Mutmainah⁷² dan Amalia Ramdhaningsih dan I Made Karya Utama⁷³ yang menyatakan bahwa dewan komisaris independen berpengaruh negatif terhadap pengungkapan CSR. Hasil penelitian yang dilakukan Effendy,⁷⁴ menemukan terdapat kendala dalam dewan komisaris independen yaitu masih lemahnya kompetensi dan integritas. Pengangkatan komisaris independen sebagian hanya didasarkan atas

⁷⁰Amirul Khoirudin, "Corporate Governance."

⁷¹Riha Dedi Priantana dan Ade Yustian, "Pengaruh Struktur *Good Corporate Governance*."

⁷²Lu'liyatul Mutmainah, "Pengaruh Elemen *Good Corporate Governance* dan Ukuran Perusahaan Terhadap Pengungkapan Tanggungjawab Sosial: Pendekatan *Islamic Reporting Index* (studi Kasus Pada Bank Umum Syariah Periode 2011-2014)."

Skripsi tidak diterbitkan, Yogyakarta: Program Strata Satu, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2016.

⁷³Amalia Ramdhaningsih dan I Made Karya Utama, "Pengaruh Indikator *Good Corporate Governance*."

⁷⁴Muh. Arief Efendy, *The Power Of Good Corporate Governance: Teori dan Implementasi*, Jakarta: Salemba Empat, 2009.

penghargaan semata, adanya hubungan keluarga atau kenalan dekat.

Hasil pengujian dalam penelitian ini menunjukkan bahwa dewan direksi berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengungkapan CSR. Orang-orang yang duduk di dewan redaksi memiliki kompetensi yang tepat dan integritas yang tinggi dapat mengarahkan sebuah perusahaan melaksanakan kewajiban-kewajibannya dengan baik. Dewan direksi baik secara individual maupun secara kolektif dapat melaksanakan tugas mereka secara efisien dan efektif sehingga manajemen sebuah bank dapat berjalan dengan baik.⁷⁵ Dewan direksi pada bank syariah melakukan fungsi pengawasan dengan I'tikad baik, kehati-hatian, dan bertanggung jawab. Kesalahan maupun kelalaian Dewan Komisaris yang menyebabkan kerugian bagi perseroan harus dipertanggung jawabkan oleh Dewan Komisaris bahkan sampai pertanggung jawaban pribadi.⁷⁶ Dengan demikian kewajiban bank terhadap pemenuhan tanggung jawab sosial pun dapat dipenuhi seperti yang diamanatkan peraturan

pemerintah. Hasil penelitian ini bertentangan dengan hasil penelitian Lu'liyatul Mutmainah⁷⁷ yang menyatakan bahwa jumlah dewan direksi tidak berpengaruh terhadap pengungkapan CSR.

Hasil pengujian dalam penelitian ini menunjukkan bahwa dewan pengawas syariah berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap pengungkapan CSR. Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian Lu'liyatul Mutmainah⁷⁸ dan Amirul Khorudin⁷⁹ yang menyatakan bahwa jumlah dewan pengawas syariah tidak berpengaruh terhadap pengungkapan CSR. Ditolaknya hipotesis ini kemungkinan disebabkan karena dewan pengawas syariah yang masih terfokus pada tugas dan tanggung jawabnya dalam kegiatan operasional perbankan syariah, misalnya mengenai persetujuan produk baru, mengawasi apakah akad sudah sesuai dengan prinsip syariah dan *review* laporan keuangan bank syariah, sehingga menyebabkan kurangnya perhatian DPS atas pengungkapan CSR.

Jika menggunakan pendekatan teori keagenan (*agency theory*) secara teori,

⁷⁵J. Charkham, "Guidance for the Directors of Banks," Retrieved 13 Pebruari 2017, from Global Corporate Governance Forum: http://www.ifc.org/wps/wcm/connect/bd9bc00048a7e730aa6fef6060ad5911/Focus_2_Guidance_for_Directors_of_Banks.pdf?MOD=AJPERES (2003), 15.

⁷⁶Syukron, A., "Pengaturan dan Pengawasan pada Bank Syariah," *Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam* 2, no. 1 (2012): 28.

⁷⁷Lu'liyatul Mutmainah, "Pengaruh Elemen Good Corporate Governance."

⁷⁸Lu'liyatul Mutmainah, "Pengaruh Elemen Good Corporate Governance."

⁷⁹Amirul Khoirudin, "Corporate Governance."

pengungkapan tanggungjawab sosial perusahaan dalam laporan keuangan bertujuan untuk mengurangi asimetri informasi (ketimpangan informasi antara manajer dan pemilik modal) ketika informasi laba hanya memberikan sedikit informasi tentang nilai perusahaan. Laporan tahunan adalah salah satu media yang digunakan oleh perusahaan untuk berkomunikasi langsung dengan para investor. Pengungkapan informasi dalam laporan tahunan yang dilakukan oleh perusahaan diharapkan akan mengurangi asimetri informasi dan juga mengurangi *agency problems*. Akan tetapi dengan munculnya mekanisme pengungkapan informasi tersebut akan menimbulkan biaya yaitu *agency cost*.

Dalam teori ini, di mana manajemen bank syariah diasumsikan bahwa semua individu bertindak atas kepentingan mereka sendiri. Sehingga terjadi konflik kepentingan antara pemilik dan agen karena kemungkinan agen tidak selalu berbuat sesuai dengan kepentingan prinsipal (pemegang saham), sehingga memicu biaya keagenan (*agency cost*). Pemegang saham sebagai prinsipal diasumsikan hanya tertarik kepada hasil keuangan yang bertambah atau investasi mereka di dalam perusahaan. Sedangkan para agen diasumsikan menerima kepuasan berupa

kompensasi keuangan dan syarat-syarat yang menyertai dalam hubungan tersebut.

Manajemen bank syariah sebagai agen yang melakukan pengungkapan informasi tanggung jawab sosial dengan tujuan untuk membangun *image* perusahaan dan mendapatkan perhatian dari masyarakat tentunya memerlukan biaya dalam rangka melaksanakan program-program tanggungjawab sosial perusahaan sekaligus memberikan informasi pertanggungjawaban sosialnya, sehingga hal ini berdampak pada laba yang dilaporkan akan menjadi lebih rendah.

Hal ini tentunya tidak disukai oleh *principal*, sehingga kualitas pengungkapan CSR yang dilakukan oleh manajemen bank syariah masih tergolong rendah. Disamping itu, pangsa pasar bank syariah masih tergolong sangat rendah dari pangsa pasar perbankan Indonesia. Maka manajemen bank syariah cenderung berfokus untuk meningkatkan laba dan aset bank syariah demi percepatan pertumbuhan bank syariah.⁸⁰

6. KESIMPULAN DAN SARAN

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh tata kelola perusahaan terhadap pengungkapan tanggungjawab sosial perusahaan pada bank umum syariah di Indonesia. Dengan

⁸⁰Ali Syukron, *Pengaruh Tanggungjawab Sosial*, 114.

menggunakan metode analisis regresi berganda, hasil pengujian terhadap 4 sampel bank umum syariah di Indonesia diperoleh sebagai berikut :

1. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaruh tata kelola perusahaan dalam hal dewan komisaris independen berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengungkapan tanggungjawab sosial perusahaan pada bank umum syariah di Indonesia.
2. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaruh tata kelola perusahaan dalam hal dewan direksi berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengungkapan tanggungjawab sosial perusahaan pada bank umum syariah di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaruh tata kelola perusahaan dalam hal dewan pengawas syariah berpengaruh negatif terhadap pengungkapan tanggungjawab sosial perusahaan pada bank umum syariah di Indonesia.

Penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti dengan judul “Pengaruh Tata Kelola Perusahaan Terhadap Tanggungjawab Sosial Perusahaan Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia” belum sempurna, akan tetapi dapat dijadikan dasar bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam pengembangan perbankan syariah. Oleh karena itu, terdapat beberapa saran antara lain:

1. Sampel untuk bank umum syariah tidak hanya yang masuk kategori Bank Umum Swasta Nasional (BUSN) Devisa.
2. Variabel yang digunakan untuk mengukur GCG tidak hanya 3 (tiga) variabel sebagaimana yang disebutkan diatas, dapat pula ditambah dengan variabel lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Arief Effendi, Muh., *The Power Good Corporate Governance Teori dan Implementasi*, Jakarta: Salemba Empat, 2009.
- Efendy, Muh. Arief, *The Power Of Good Corporate Governance: Teori dan Implementasi*, Jakarta: Salemba Empat, 2009.
- Ferlie *et. al*, *Akuntabilitas Birokarsi Publik: Sketsa Pada Masa Transisi*, Cet. III, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013.
- Hutabarat, Jemsly, dan Martani Huseini, *Proses, Formasi, dan Implementasi Manajemen Strategi Kontemporer Operasionalisasi Strategi*, Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2006.
- Hendrawan, Sanerya, *Spiritual Management*, Cetakan I, Bandung: Pt. Mizan Pustaka, 2009.
- Hadi, Syamsul, *Metodologi Penelitian Untuk Akuntansi dan Keuangan*, Yogyakarta: Ekonosia, 2006.
- Muhammad, *Sistem dan Prosedur Operasional Bank Islam*, Yogyakarta: UII Press, 2000.

- Nurdin, N., & Mir'atun, M. a. (2018). Do Government And Private Sharia Commercial Banks Practice Similar Financial Social Responsibility Disclosure? *HUNAF: Jurnal Studia Islamika*, 15(2), 285-321.
- Otoritas Jasa Keuangan (OJK), *Statistik Perbankan Syariah*, Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan, 2015.
- Surya, Indra dan Ivan Yustiavandana, *Penerapan Good Corporate Governance*, Jakarta: Kencana, 2008.
- Syakhroza, Akhmad, *Corporate Governance Sejarah dan Perkembangan, Teori, Model, dan Sistem Governance Serta Aplikasinya Pada Perusahaan BUMN*, Jakarta: FEUI, 2005.
- S.P. Hasibuan, Malayu S, *Manajemen: Dasar, Pengertian, dan Masalah*, Ed. Revisi, Cet. 6, Jakarta: Bumi Aksara, 2007.
- Supardi, *Metodologi Penelitian Ekonomi Bisnis*, Yogyakarta: UII Press, 2005.
- Subagyo dan Djarwanto, *Statistika Induktif*, Yogyakarta: BPFE Yogyakarta, 2005.
- Tisnawati Sule, Erni, dan Kurniawan Saefullah, *Pengantar Manajemen*, Jakarta: Kencana, 2005.
- Usman, Husaini dan Purnomo Setiady Akbar, *Pengantar Statistik*, Edisi Kedua Jakarta: Pt. Bumi Aksara, 2011.
- Jurnal dan Artikel**
- Andriani, “Pengaruh Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Terhadap Kualitas Pengungkapan Informasi Tanggung Jawab Sosial Dan Dampaknya Pada Nilai Perusahaan: Studi Empiris Pada Perusahaan Publik Di Bursa Efek Indonesia,” *Jurnal Wawasan Manajemen* 3, no. 1 (Februari 2015).
- Agung Ayu Pramita Indraswari, I Gusti, dan G Agus Indra Tenaya, “Pengaruh *Leverage*, Tata Kelola dan Karakteristik Perusahaan Pada Perataan Laba Perusahaan Yang Terdaftar di Bursa efek Indonesia,” *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayan* 14, (Januari 2016).
- Ayu Sasmika Putri, Ida dan Bambang Suprasto H, “Pengaruh Tanggung Jawab Sosial Perusahaan dan Mekanisme Tata Kelola Perusahaan Terhadap Nilai Perusahaan,” *E-Jurnal Akuntansi Uneversitas Udayana* 15, no.1 (April 2016).
- Anto, M.B. Hendrie dan Dwi Retno Astuti , “Persepsi Stakeholder Terhadap Pelaksanaan Corporate Social Responsibility Kasus Pada Bank Syariah di DIY,” *Sinergi: Kajian Bisnis dan Manajemen* 10, no.1 (Januari 2008).
- Amri, Saiful, Andi Tri Haryono, dan M Mukery Warso, “Pengaruh *Good Corporate Governance* Terhadap Kinerja Karyawan PT. Aditec Cakrawiyasa Semarang,” *Journal of Management* 2, no. 2 (Maret 2016).
- Agustin Roziani, Erna dan Sofie, “Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Tingkat Pengungkapan Sosial Dalam Laporan Tahunan Bank Konvensional Dan Bank Syariah Di Indonesia,” *TAZKIA| Islamic Finance & Business Review* 5, no. 1 (Januari—Juli 2010).
- Bajra, Bayu, Zainul Arifin, dan Sunatri, “Analisis Pengaruh CSR (*Corporate Social Responsibility*) Terhadap Citra Perusahaan: Studi Kasus Pada Masyarakat Sekitar PT. Adora Indonesia Di Kalimantan Selatan,” *Jurnal Administrasi Bisnis (JAB)* 30. no. 1 (Januari 2015).
- Charkham, J., “Guidance for the Directors of Banks,” Retrieved 13 Pebruari 2017, from Global Corporate Governance

- Forum:
http://www.ifc.org/wps/wcm/connect/bd9bc00048a7e730aa6fef6060ad5911/Focus_2_Guidance_for_Directors_of_Banks.pdf?MOD=AJPERES
 (2003).
- Dedi Priantana, Riha dan Ade Yustian, “Pengaruh Struktur *Good Corporate Governance* Terhadap Pengungkapan *Corporate Social Responsibility* Pada Perusahaan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia”, *Jurnal Telaah dan Riset Akuntansi* 4, no. 1 (Januari 2011).
- Ferial, Feri, Suhadak, dan Siti Ragil Handayani, “Pengaruh *Good Corporate Governance* Terhadap Kinerja Keuangan Dan Efeknya Terhadap Nilai Perusahaan: Studi Pada Badan Usaha Milik Negara Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2012-2014,” *Jurnal Administrasi Bisnis (JAB)* 33. no. 1 (April 2016).
- Hisamuddin, Nur dan M. Yayang Tirta K, Pengaruh *Good Corporate Governance* Terhadap Kinerja Keuangan Bank Umum Syariah, (on-line) (http://respository.unej.ac.id/bitstream/handle/123456789/58628/Nur%20Hisamuddin_1.pdf?sequence=1), diakses 30 Mei 2016.
- Harmoni, Ati dan Ade Andriyani, “Pengungkapan *Corporate Social Responsibility* (CSR) Pada *Official Website* Perusahaan: Studi Pada PT. Unilever Indonesia Tbk,” *KOMMIT* (Agustus 2008).
- Hidayati Setyani, Nur “Implementasi Prinsip *Good Corporate Governance* Pada Perbankan Syariah Di Indonesia,” *Economica* 1, no. 1 (Mei 2010).
- Indrawati, Novita, “Pengungkapan *Corporate Social Responsibility* (CSR) Dalam *Annual Report* Serta Pengaruh *Political Visibility* Dan *Economic Performance*,” *Pekbis Jurnal* 1, no. 1 (Maret 2009).
- Ilhamai, Haniah, “Pertanggungjawaban Dewan Pengurus Syariah Sebagai Otoritas Pengawas Kepatuhan Syariah Bagi Bank Syariah,” (on-line) (<https://journal.ugm.ac.id/jmh/article/download/16274/10820>), diakses 9 Agustus 2017.
- Kusnardani Iskandar, Bintang, “Analisis Penerapan Prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* Dan Pengendalian Internal,” *Jurnal Ilmu Dan Riset akuntansi* 4. no. 10 (2015).
- Khoirudin, Amirul “*Corporate Governance* dan Pengungkapan *Islamic Social Reporting* Pada Perbankan Syariah Di Indonesia,” *Accounting Analysis Journal* 2 (2) (2013).
- Kunthi Setyowati, Valeria, Zahro Z.A, dan M.G W Endang, “Pengaruh Pengungkapan *Good Corporate Governance* Dan *Corporate Social Responsibility* Terhadap Nilai Perusahaan: Pada Indeks Bisnis-27 Yang Terdaftar Di BEI Periode 2010-2012,” *Jurnal Administrasi Bisnis (JAB)* 15, no. 1 (Oktober 2014).
- Kamil, Ahmad dan Antonius Herusetya, “Pengaruh Karakteristik Perusahaan Terhadap Luas Pengungkapan Kegiatan *Corporate Social Responsibility*,” *Media Riset Akuntansi* 2. no. 1 (Februari 2012).
- Murwaningsari, Etty “Hubungan *corporate Governance*, *Corporate Social Responsibility* dan *Corporate Financial Performance* Dalam Satu Continuum,” *Jurnal Akuntansi dan Keuangan* 11, no. 1 (Mei 2009).
- Masruki, Rosnia *et. al*, “Incorporating *Corporate Social Responsibility* (CSR) Into Sustainable Financial Performance of Islamic Banks in

- Malaysia” *Langkawi Islamic Finance and Economics International Conference*, Insaniah University College, (2010).
- Murwaningsih, Ety, ”Hubungan *Corporate Governance*, *Corporate Social Responsibility*, dan *Corporate Financial Performance* Dalam Satu Continuum,” *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan* 11, no. 1 (Mei 2009).
- Natalylova, Kartina, “Pengaruh *Corporate Governance* Terhadap *Corporate Social Responsibility* dan Kinerja Perusahaan Yang Mendapatkan Indonesia *Sustainability Reporting Awards*,” *Media Bisnis* (November 2013).
- Nasution, MARIHOT dan DODDY SETIAWAN, “Pengaruh *Corporate Governance* Terhadap Manajemen Laba Di Industri Perbankan Indonesia,” *Simposium Nasional Akuntansi X* (Juli 2007).
- Nurlela, Rika dan Islahuddin, ”Pengaruh *Corporate Social Responsibility* Terhadap Nilai Perusahaan Dengan Prosentase Kepemilikan Manajemen Sebagai Variabel Moderating: Studi Empiris Pada Perusahaan Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia,” *Simposium Nasional Akuntansi XI* (Juli 2008).
- Nur Aini, Nike dan Nur Cahyonowati, “Pengaruh Karakteristik *Good Corporate Governance* (GCG) Terhadap Pengungkapan *Corporate Social Responsibility* (CSR): Studi Empiris Pada Perusahaan Non Keuangan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia,” (On-Line), (<http://eprints.undip.ac.id/20144/1/Skripsi012.pdf>), diakses Tanggal 13 Oktober 2016.
- Nur Farida, Yusriati, Yulia Prasetyo, dan Eliada Herwiyanti, “Pengaruh Penerapan *Corporate Governance* Terhadap Timbulnya *Earnings Management* Dalam Menilai Kinerja Keuangan Pada Perusahaan Perbankan Di Indonesia,” *Jurnal Bisnis Dan Akuntansi* 12, no. 2 (Agustus 2010).
- Putri Pamungkas, Dian “Pengaruh *Good Corporate Governance* (GCG) Terhadap Implementasi *Corporate Social Responsibility* (CSR) Pada Industri Pertambangan dan Penggalian (BUMN Persero Terbatas),” (on-line), (<http://ejournal.unesa.ac.id/article/1188/57/article.pdf>), diakses 30 Mei 2016.
- Pangeran, Perminas dan Deresti Salaunaung, “Praktek Tata Kelola dan Kepemilikan Institusional: Bukti Emperis Dari Sektor Industri Perbankan,” *Jurnal Akuntansi XX*, no. 02 (Mei 2016).
- Rimardhani, Helfina, R. Rustam Hidayat, dan Dwiatmanto, “Pengaruh Mekanisme *Good Corporate Governance* Terhadap Profitabilitas Perusahaan: Studi Pada Perusahaan BUMN Yang Terdaftar Di BEI Tahun 2012-2014,” *Jurnal Administrasi Bisnib (JAB)* 31, no. 1 (Februari 2016).
- Ramdhaningsih, Amalia dan I Made Karya Utama,”Pengaruh Indikator *Good Corporate Governance* dan Profitabilitas Pada Pengungkapan *Corporate Social Responsibility*,” *E-Jurnal Akuntansi* 3, no. 3 (2013).
- Rahmat, Agung, “*Good Corporate Governance* (GCG) Sebagai Prinsip Implementasi *Corporate Social Responsibility* (CSR): Studi Kasus Pada *Community Development Center* PT. Telkom Malang,” *Jurnal Skripsi/FEB UB* (2013).
- Ratnadewi, Ari, dan I G.K Agung Ulupui, “Mekanisme *Corporate Governance* Sebagai Variabel Pemodrasi Pengaruh

- Pengungkapan *Corporate Social Responsibility* Pada Nilai Perusahaan,” *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana* 14, no. 1 (Januari 2016).
- Sudaryati, Dwi dan Yunita Eskadewi, “Pengaruh *Corporate Governance* Terhadap Tingkat Pengungkapan *Corporate Social Responsibility* Di Bank Syariah, *Jurna Ekonomi dan Bisnis* 11, no. 01 (September 2012).
- Sudana, I Made dan Putu Ayu Arliandina W, “*Good Corporate Governance* Dan Pengungkapan *Corporate Social Responsibility* Pada Perusahaan *Go-Public* Di Bursa Efek Indonesia,” *Jurnal Manajemen Teori Dan Terapan* 4, no. 1 (April 2011).
- Setyarini, Yulia dan Melvie Paramitha, “Pengaruh Mekanisme *Good Corporate Governance* Terhadap *Corporate Social Responsibility*,” *Kewirausahaan* 5, no. 2 (2011).
- S. Kaihatu, Thomas, “*Good Governance* Dan Penerapannya Di Indonesia,” *Jurnal Manajemen Dan Kewirausahaan* 8, no. 1 (Maret 2006).
- Sulthon Fauzi, Armi, Ni Ketut Suransi, dan Alamsyah, “Pengaruh GCG Dan CSR Terhadap Nilai Perusahaan Dengan Profitabilitas Sebagai Variabel Pemoderasi,” *Jurnal Infestasi* 12, no. 1 (Juni 2016).
- Sudana, I Made, dan Putu Ayu Arlindinia W, “*Corporate Governance* Dan Pengungkapan *Corporate Social Responsibility* Pada Perusahaan *Go-Public* Di Bursa Efek Indonesia,” *Jurnal Manajemen Teori Dan Terapan* 4, no. 1 (April 2011).
- Siswantoro, Dodik et al. “*Corporate Social Responsibility Disclosurein Malaysia: An Analysis of Annual Reports of KLSE Listed Companies*,” *IIUM Journal of Economics and Management* 11, no. 1 (2003).
- Titan Terzaghi, Muhammad “Pengaruh *Earning Management* dan Mekanisme *Corporate Governance* Terhadap Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar Di Busra Efek Indonesia,” *Jurnal Ekonomi dan Informasi Akuntansi (JENIUS)* 2, no. 1 (Januari 2012).

Skripsi dan Tesis

- Ashifa, Izza, “Pengaruh *Corporate Governance* Dan Karakteristik Perusahaan Terhadap Pengungkapan *Corporate Responsibility*,” Skripsi tidak diterbitkan, Semarang: Program Strata Satu, Universitas Diponegoro, 2016.
- Candra Indrawan, Danu, *Pengaruh Corporate Social Responsibility Terhadap Kinerja Perusahaan*, Skripsi tidak diterbitkan, Semarang: Program Strata Satu, Universitas Diponegoro, 2016.
- Dwi Putri, Cynthia, “Pengaruh *Corporate Governance* dan Karakteristik Perusahaan Terhadap Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di Dalam *Sustainability Report*: Studi Empiris Perusahaan yang Terdaftar di BEI,” Skripsi diterbitkan, Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang, Padang, 2013.
- Fahrizqi, Anggara, “*Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Pengungkapan Corporate Social Responsibility (CSR) Dalam Laporan Tahunan Perusahaan: Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Dalam Bursa Efek Indonesia*,” Skripsi tidak diterbitkan, Semarang: Program Strata Satu, Universitas Diponegoro, 2010.

- Fatimatuzahra, Dwi, “Analisis Perbandingan Pengungkapan *Corporate Social Responsibility* Antara Bank Syariah Indonesia Dengan Bank Syariah Malaysia,” Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
- Irhami, Lazuwar, “*Pengaruh Komisaris Independen, Ukuran Perusahaan Dan Profitabilitas Terhadap Voluntary Disclosure (Studi Pada Perusahaan Perbankan yang Terdaftar Di BEI Tahun 2012-2015)*” Skripsi tidak diterbitkan, Palu: Program Strata Satu, Universitas Tadulako, 2016.
- Nurdiyana, Ana, “*Pengaruh Good Corporate Governance Dan Pengungkapan Corporate Social Responsibility Terhadap Nilai Perusahaan,*” Skripsi tidak diterbitkan, Semarang: Program Strata Satu, Universitas Diponegoro, 2010.
- Okta Riansyah, Andi, “*Rekonstruksi Pelaporan Corporate Social Responsibility Perbankan Syariah Dalam Konsep Social Maslahah: Studi Bank Muamalat Indonesia, Bank Syari’ah Mandiri, dan Bank Rakyat Indonesia,*” Skripsi tidak diterbitkan, Semarang: Program Strata Satu, Universitas Diponegoro, 2016.
- Rini Tahsin, Yustika, “*Penerapan Prinsip-prinsip Good Corporate Governance (GCG) Pada PT. Bank Syari’ah Cabang Pekanbaru Menurut Ekonomi Islam,*” Skripsi tidak diterbitkan, Riau: Program Strata Satu, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2010.
- Romadhon Putro, Alif, “*Pengaruh Profitabilitas, Kepemilikan Institusional, Pajak, Dan Kualitas Good Corporate Governance Terhadap Manajemen Laba: Studi Empiris Pada Perusahaan Go Publik Yang Terdaftar Dalam Penilaian IICG Pada Tahun 2011-2013,*” Skripsi tidak diterbitkan, Surakarta: Program Strata Satu, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2016.
- Rustiarini, Ni Wayan, “*Pengaruh Struktur Kepemilikan Saham Pada Pengungkapan Corporate Social Responsibility,* (Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Mahasaraswati Denpasar, Bali, 2011).
- Syukron, Ali, “*Pengaruh Tanggungjawab Sosial Perusahaan Terhadap Kinerja Keuangan Bank Umum Syariah,*” Tesis Tidak Diterbitkan, Jakarta: Sekolah Pasca Sarjana, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2013.